



Forest Stewardship Council®



Kebijakan untuk Asosiasi FSC

FSC-POL-01-004 V3-0

DRAF 5-0

Catatan untuk konsultasi: Dalam draf ini, kami telah menandai bagian di mana pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik.



Judul: Kebijakan untuk Asosiasi FSC

Kode referensi dokumen: FSC-POL-01-004 V3-0

Badan persetujuan: Dewan Direksi FSC

Hubungi untuk komentar: Dispute Resolution
FSC Global Development
Adenauerallee 134
53113 Bonn, Germany

+49 -(0)228 -36766 -0

+49 -(0)228 -36766 -65

dispute.resolution@fsc.org

© 2022 Forest Stewardship Council, A.C. Semua hak dilindungi undang-undang.
FSC®F000100.

Tidak ada bagian dari karya yang dilindungi oleh hak cipta penerbit ini yang boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (grafik, elektronik, atau mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, memvideokan, atau sistem pencarian informasi) tanpa izin tertulis dari penerbit.

Salinan cetak dari dokumen ini hanyalah untuk referensi. Silakan merujuk ke salinan elektronik di situs web FSC (ic.fsc.org) untuk memastikan bahwa Anda mengacu pada versi terkini.

DRAF 5-0

Forest Stewardship Council® (FSC) adalah organisasi non-pemerintah independen, nirlaba, yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.

Visi FSC adalah bahwa hutan dunia memenuhi hak dan kebutuhan sosial, ekologi, dan ekonomi generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Pendahuluan

Hutan menopang kehidupan di bumi dan harus dilindungi. Itulah alasan keberadaan FSC: untuk memberikan solusi pengelolaan hutan lestari yang dipercaya oleh LSM, konsumen, dan bisnis untuk melindungi hutan yang sehat dan tangguh, untuk semua, selamanya. Kami menyatukan para ahli dari bidang lingkungan, ekonomi dan sosial untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang bertanggung jawab. *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* adalah pernyataan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan organisasi *terkait** dengan FSC. Hal ini mendefinisikan enam kegiatan yang tidak dapat diterima, yang individu dan organisasi serta *grup perusahaan** *terkait** mereka berkomitmen untuk hindari dalam operasi bersertifikat dan non-bersertifikat.

Kebijakan untuk Asosiasi FSC berfungsi sebagai alat manajemen risiko untuk FSC, melindungi kredibilitas dan reputasi merek dan organisasi FSC yang *terkait** dengannya. Ini berlaku untuk seluruh *grup perusahaan** meskipun hanya sebagian terbatas dari grup yang memiliki hubungan aktif dengan FSC. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan nilai-nilai inti FSC ke organisasi-organisasi di *grup perusahaan** yang tidak sendiri aktif dalam sistem sertifikasi. Lingkup kebijakan ini adalah sarana untuk menghindari kebingungan atau penggunaan nama FSC dalam kaitannya dengan kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip inti FSC dan yang dapat membahayakan kemampuan FSC untuk menjalankan misinya. Kebijakan ini juga memungkinkan untuk memerlukan perbaikan dan pemulihan serta pemutusan semua ikatan kontrak dengan individu atau organisasi yang ditemukan melanggar kebijakan.

Implementasi kebijakan

Untuk melindungi reputasi FSC dan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak dapat diterima, FSC akan menilai beberapa pilihan, dari mediasi hingga investigasi, sanksi dan penetapan kondisi, untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi *terkait** dengan FSC. Tindakan dan konsekuensinya tergantung pada beratnya pelanggaran. Pemangku kepentingan harus terlibat dalam semua upaya yang wajar untuk mengatasi masalah sebelum mengajukan *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* keluhan.

*Tuduhan** pelanggaran *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* terhadap individu dan organisasi *terkait** diterima dan dievaluasi oleh FSC setelah menyajikan informasi penting* bahwa individu atau organisasi atau *grup perusahaan** terkaitnya telah melanggar kebijakan.

Untuk mengimplementasikan *Kebijakan untuk Asosiasi FSC*, digunakan dua dokumen prosedural:

- 1) Seorang individu atau organisasi yang ingin bergabung dengan FSC harus menjalani proses penyaringan dan mengungkapkan informasi, sesuai dengan FSC-PRO-10-004 *Persyaratan Pengungkapan untuk Asosiasi dengan FSC*.
- 2) Jika potensi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut menjadi perhatian FSC, maka *Memproses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* FSC-PRO-01-009 akan diterapkan.

Riwayat versi

V1-0 Dewan Direksi FSC menyetujui elemen penting dari *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* pada bulan Juli 2009 – enam kegiatan yang tidak dapat diterima, yaitu organisasi yang ingin berasosiasi dengan FSC tidak dapat terlibat secara

langsung atau tidak langsung (lihat Bagian I) – tetapi menyadari bahwa pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan secara lebih rinci.

- V2-0 Dewan Direksi FSC menyetujui rincian implementasi kebijakan (lihat Bagian II) pada bulan September 2011.
- V3-0 V3-0 Draft 5-0 dari V3-0 memperkenalkan definisi dari *grup perusahaan** untuk menentukan ruang lingkup penerapan kebijakan, klarifikasi untuk penerapan beberapa kegiatan yang tidak dapat diterima, penyelarasan dengan interpretasi yang ada mengenai penelitian di bidang rekayasa genetika dan definisi yang diselaraskan dengan draf terbaru dari *Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC (FSC-POL-01-007)*.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	3
Riwayat versi.....	3
Daftar Isi.....	4
A Tujuan.....	4
B Lingkup	4
C Tanggal efektif dan validitas.....	5
D Referensi.....	5
Bagian I: Elemen kebijakan	6
Bagian II: Implementasi kebijakan	6
Lampiran 1: Grup perusahaan.....	8
Lampiran 2: Keterlibatan dalam kegiatan yang tidak dapat diterima	9
Lampiran 3: Istilah dan definisi.....	10

A Tujuan

Tujuan dari *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* adalah untuk menangani kegiatan yang tidak dapat diterima yang berdampak parah pada hutan dan masyarakat di lapangan, serta risiko reputasi berikutnya yang memengaruhi FSC. Kebijakan tersebut mendefinisikan aktivitas yang tidak dapat diterima ini dan menentukan organisasi dan individu mana saja yang dapat atau tidak dapat *terkait** dengan FSC.

B Lingkup

Kebijakan Asosiasi FSC berlaku untuk semua individu, organisasi, dan *grup perusahaan* terkaitnya** dan bagi mereka yang mencari *asosiasi** dengan FSC.

Kebijakan tersebut menyatakan lima aktivitas yang tidak dapat diterima (lihat Bagian I: Elemen kebijakan) yang individu, organisasi dan *grup perusahaan** dan *terkaitnya**

harus berkomitmen hindari dan menentukan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan ini (lihat Bagian II: Implementasi kebijakan).

Kebijakan ini berlaku untuk situasi ketika aktivitas yang tidak dapat diterima sedang atau telah terjadi. Niat untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima bukanlah alasan yang cukup untuk memicu penyelidikan atau pengaduan. Namun, niat untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima dapat memicu tindakan proaktif lainnya oleh FSC, termasuk pengumpulan informasi dan pemantauan, untuk membantu memastikan bahwa aktivitas yang tidak dapat diterima tidak terjadi di waktu mendatang.

Dalam semangat sistem FSC, perselisihan harus selalu ditangani pada tingkat serendah mungkin, dan para pemangku kepentingan didorong untuk mengikuti prinsip ini. Pengaduan terkait pelanggaran *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* yang tumpang tindih dengan kesesuaian organisasi dengan persyaratan sertifikasinya harus terlebih dahulu ditangani oleh lembaga sertifikasi masing-masing melalui prosedur pengaduan yang ditetapkan.

Jangka waktu sejauh mana pelanggaran dianggap relevan ditangani berdasarkan kasus per kasus, kecuali ditentukan dalam kebijakan ini, dengan menggunakan kondisi seperti, namun tidak terbatas pada: i) apakah masih ada kerugian; ii) skala dan dampak kerugian yang ditimbulkan; iii) tingkat tindakan yang telah diambil untuk memperbaiki kerugian masa lalu; iv) apakah ada perubahan sistemik yang dapat dibuktikan untuk mencegah terulangnya kembali aktivitas yang tidak dapat diterima.

Kebijakan versi 3-0 ini akan berlaku sejak tanggal berlaku efektifnya. Kebijakan versi 2-0 sebelumnya tetap berlaku untuk pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal berlakunya versi 3-0.

Catatan untuk konsultasi:

Silakan lihat pertanyaan mengenai periode aplikasi di [Platform Konsultasi FSC](#).

C Tanggal efektif dan validitas

Tanggal persetujuan	akan ditentukan
Tanggal publikasi	akan ditentukan
Tanggal berlaku	akan ditentukan
Masa berlaku	sampai digantikan atau ditarik

D Referensi

Referensi berikut ini sangat penting untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan yang tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amendemennya).

<i>FSC-PRO-01-009</i>	<i>Memproses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC</i>
<i>FSC-PRO-10-004</i>	<i>Persyaratan Pengungkapan untuk Asosiasi dengan FSC</i>
<i>FSC-POL-01-007</i>	<i>Kebijakan untuk Menangani Konversi FSC</i>
<i>FSC-PRO-01-007</i>	<i>Kerangka Kerja Perbaikan FSC</i>
<i>FSC-STD-01-002</i>	<i>Daftar Istilah FSC</i>
	<i>Statuta FSC</i>

Bagian I: Elemen kebijakan

1. FSC bertujuan untuk berasosiasi dengan individu dan organisasi yang selaras dengan misi dan nilai-nilai FSC dan tidak akan memungkinkan *asosiasi** jika individu, organisasi, atau *grup perusahaannya ** sedang atau telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima berikut ini:

- a) *Penebangan liar atau perdagangan ilegal* hasil hutan**
- b) Pelanggaran *adat** atau *hak asasi manusia** di dalam kehutanan atau *sektor hasil hutan**
- c) Pelanggaran *prinsip dan hak pekerja** didefinisikan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja di dalam kehutanan atau *sektor hasil hutan**
- d) *Konversi signifikan** dari tutupan *hutan alam** atau dari *kawasan bernilai konservasi tinggi**
- e) Pengenalan atau penggunaan *rekayasa genetika** pohon untuk tujuan selain penelitian (yang dapat mencakup uji coba lapangan), seperti untuk tujuan komersial.

CATATAN: Lihat Lampiran 1 untuk kriteria yang mendefinisikan *grup perusahaan** dan Lampiran 2 untuk pertimbangan lebih lanjut tentang keadaan ketika pihak *terkait** telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima.

Bagian II: Implementasi kebijakan

2. Uji kelayakan dan pengungkapan

2.1. Seorang individu atau organisasi *terkait** harus memastikan bahwa mereka dan *grup perusahaan** mereka memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghindari keterlibatan apa pun dalam aktivitas relevan yang tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Bagian I. Keberadaan kebijakan tersebut tidak diverifikasi oleh FSC sebelum *asosiasi**. Dalam kasus keluhan, kurang memadainya *uji kelayakan** untuk menghindari risiko pelanggaran terhadap *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* akan dipertimbangkan.

2.2. FSC hanya akan mengadakan, atau mempertahankan, sebuah *asosiasi** dengan individu atau organisasi yang sesuai dengan persyaratan pengungkapan *Persyaratan Pengungkapan untuk Asosiasi dengan FSC* FSC-PRO-10-004.

3. Mengevaluasi tuduhan

3.1. Setiap pemangku kepentingan dapat mengajukan keluhan jika ada informasi penting* bahwa individu atau organisasi *terkait** atau *grup perusahaannya ** diduga melanggar kebijakan ini. Keluhan diproses sesuai dengan *Memproses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* FSC-PRO-01-009.

4. Konsekuensi dari pelanggaran kebijakan ini

4.1. Seorang individu atau organisasi *terkait** yang terbukti melanggar kebijakan ini, bersama dengan *grup perusahaannya**, akan menghadapi salah satu dari

dua konsekuensi, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam FSC-PRO-01-009:

- a. Mempertahankan *asosiasi** dengan kondisi terikat waktu yang harus dipenuhi untuk tetap *terkait** dengan FSC. Individu atau organisasi *terkait** harus setuju untuk memenuhi persyaratan ini. Kegagalan untuk mengimplementasikannya dalam batas waktu yang disepakati akan menjadi alasan untuk *disasosiasi**.
- b. *Disasosiasi** dari FSC, dengan prasyarat utama yang harus dipenuhi sebelum mempertimbangkan proses untuk mengakhiri *disasosiasi**.

CATATAN: Lihat FSC-PRO-01-009 untuk daftar faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan konsekuensi pelanggaran, serta jenis kondisi yang harus dipenuhi untuk mempertahankan *asosiasi** atau mengakhiri *disasosiasi**. Lihat juga *Statuta FSC* untuk proses kemiskinan anggota.

- 4.2. Organisasi atau individu yang mengajukan permohonan untuk *asosiasi** yang terbukti melanggar kebijakan ini, tidak akan diberikan *asosiasi** dengan FSC.

5 Mengakhiri disasosiasi dan mengajukan permohonan asosiasi setelah pelanggaran yang dikonfirmasi

- 5.1 Individu atau organisasi yang *tidak terkait** atau ditolak yang tertarik untuk *bergabung** dengan FSC akan memasuki proses perbaikan.
- 5.2 Persyaratan khusus individu atau organisasi harus dikembangkan oleh pihak ketiga yang independen berdasarkan persyaratan umum yang ditentukan dalam *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* FSC-PRO-01-007. Persyaratan tersebut merupakan rencana bagaimana perbaikan, memperbaiki dan mencegah terulangnya pelanggaran yang teridentifikasi sebelumnya. Mereka juga dapat mempertimbangkan aktivitas yang tidak termasuk dalam keluhan awal jika mungkin melanggar *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* dan dianggap perlu untuk dimasukkan untuk alasan membangun kepercayaan. Lihat *Kerangka Kerja Perbaikan FSC* dan FSC-PRO-01-009 *Memproses Kebijakan untuk Pengaduan Asosiasi FSC* untuk informasi lebih lanjut tentang prosesnya.
- 5.3 Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan FSC mengakhiri *disasosiasi**, individu atau organisasi tersebut dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan FSC sebagai anggota dan/atau pemegang perjanjian lisensi FSC.

Catatan untuk konsultasi:

Silakan lihat pertanyaan tentang kemungkinan untuk bergabung dengan FSC setelah *konversi tidak dapat diterima** di [Platform Konsultasi FSC](#).

Lampiran 1: Grup perusahaan

Kebijakan untuk Asosiasi FSC berlaku untuk individu dan organisasi dan *grup perusahaan** terkait* milik mereka.

Tabel 1: Definisi dan faktor yang digunakan untuk menentukan *grup perusahaan*¹

Definisi dari <i>grup perusahaan*</i>:	Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan merupakan bagian dari <i>grup perusahaan*</i> yang lebih luas meliputi:
<p>Totalitas badan hukum yang organisasi <i>asosias*</i> berafiliasi dalam hubungan perusahaan dengan salah satu pihak mengontrol* kinerja pihak lain (misalnya perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, usaha patungan, dll.).</p> <p>Kontrol* dalam hal ini berarti memiliki kekuasaan untuk mengarahkan, membatasi, mengatur, memerintah, atau mengurus kinerja perusahaan lain melalui wewenang, hak, kontrak, atau cara lain.</p> <p>CATATAN: Kontrol* mungkin ada terlepas dari persentase kepemilikan; namun, itu dianggap ada (kecuali bukti menunjukkan sebaliknya) ketika sebuah organisasi atau individu memiliki lebih dari 50 persen saham di badan hukum lain.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Formalitas hubungan: Apakah ada kepemilikan formal, seperti melalui struktur holding investasi?• Dideklarasikan sebagai grup: Apakah grup telah mengumumkan secara terbuka bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terhubung?• Kontrol keluarga: Apakah perusahaan dimiliki atau dijalankan dan dikontrolkan oleh anggota keluarga yang sama?• Kontrol keuangan: Apakah ada kontrak atau pengaturan keuangan lainnya yang mengindikasikan satu pihak mengontrol kinerja pihak lain?• Kontrol manajemen: Apakah ada tumpang tindih yang luas dalam pejabat di antara perusahaan?• Kontrol operasional: Apakah kepemilikan tanah di bawah kontrol operasional grup?• Kepemilikan manfaat: Apakah kepemilikan akhir disembunyikan di perusahaan lepas pantai atau dengan menggunakan calon?• Sumber daya bersama: Apakah perusahaan berbagi alamat terdaftar, tanah atau aset fisik lainnya, atau penyediaan fungsi atau layanan perusahaan?

CATATAN: Definisi dan faktor yang digunakan untuk menentukan *grup perusahaan** dan kontrol*, akan diterapkan dan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus, dengan aplikasi yang dibangun dari waktu ke waktu melalui hukum kasus.

Contoh manajerial kontrol* dalam *grup perusahaan**

Perusahaan A memiliki beberapa sertifikat FSC, dan Perusahaan B tidak memiliki sertifikat FSC. Pemilik Perusahaan A duduk di dewan Perusahaan B dengan hak suara 20%. Pemilik Perusahaan A menetapkan tolok ukur kinerja untuk manajemen Perusahaan B. Jika Perusahaan B diketahui terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima, maka penyelidikan akan dilakukan untuk menentukan apakah Perusahaan A memiliki manajemen kontrol* atas tindakan Perusahaan B dan apakah tindakan tersebut akan dianggap sebagai bagian dari tindakan *grup perusahaan** yang sama. Jika ya, aktivitas Perusahaan B yang tidak dapat diterima merupakan pelanggaran terhadap *Kebijakan untuk Asosiasi FSC*.

¹ Definisi dan faktor yang diadaptasi dari definisi "Grup Perusahaan" oleh Accountability Framework Initiative

Lampiran 2: Keterlibatan dalam kegiatan yang tidak dapat diterima

Seorang individu atau organisasi *terkait** dan *grup perusahaan** nya melanggar *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* jika mereka sedang atau telah terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima yang ditentukan dalam klausul 1 elemen Kebijakan. Mereka dianggap terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima jika mereka memiliki *kontrol** atas aktivitas tersebut. Aktivitas yang tidak dapat diterima dapat dilakukan oleh mereka sendiri, atau oleh organisasi lain yang mereka *kontrol** lebih.

Dengan demikian, individu atau organisasi dan *grup perusahaan** dapat melanggar *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* juga melalui hubungan komersial. Hal ini ditentukan oleh adanya *kontrol** terhadap aktivitas yang tidak dapat diterima. Misalnya, aktivitas pemasok yang tidak dapat diterima merupakan pelanggaran terhadap *Kebijakan Asosiasi FSC* hanya jika *terkait** individu atau organisasi dan *grup perusahaan** nya memiliki *kontrol** atas tindakan pemasoknya.

Contoh *kontrol** dalam hubungan komersial

Perusahaan A memiliki sertifikat rantai pengawasan FSC dan membeli kayu dari Perusahaan B yang tidak bersertifikat FSC. Perusahaan B adalah pemasok untuk Perusahaan A, dan keduanya merupakan entitas perusahaan yang terpisah. Perusahaan A, bagaimanapun, adalah satu-satunya pembeli produk Perusahaan B dan kontrak penjualan antara perusahaan memberikan hak kepada Perusahaan A untuk memveto rencana pengelolaan Perusahaan B. Jika Perusahaan B diketahui terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima, maka evaluasi *Kebijakan untuk Asosiasi FSC* akan dipicu untuk menentukan apakah Perusahaan A memiliki *kontrol** atas tindakan Perusahaan B. Jika ya, tindakan yang tidak dapat diterima kegiatan Perusahaan B merupakan pelanggaran terhadap *Kebijakan untuk Asosiasi FSC*.

Lampiran 3: Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen internasional ini, istilah dan definisi yang diberikan dalam FSC-STD-01-002 *Daftar Istilah FSC* dan berikut ini berlaku:

Tuduhan: Pernyataan keyakinan bahwa beberapa kesalahan atau kerugian telah terjadi

Asosiasi (terkait, asosiasi, organisasi terkait): Sebuah asosiasi dengan FSC secara resmi didirikan melalui salah satu hubungan kontrak berikut: perjanjian keanggotaan FSC; perjanjian lisensi pemegang sertifikat FSC; perjanjian lisensi lembaga sertifikasi FSC; perjanjian kemitraan FSC.

Kontrol: Kepemilikan kekuasaan untuk mengarahkan, membatasi, mengatur, mengatur, atau mengurus kinerja perusahaan lain melalui wewenang, hak, kontrak, atau cara lain.

Konversi: *Perubahan tutupan hutan alam** yang abadi* atau *area Nilai Konservasi Tinggi** yang disebabkan oleh *aktivitas manusia**. Ini mungkin ditandai dengan *hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan**, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem atau mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Pengertian konversi mencakup *degradasi** hutan secara bertahap* serta transformasi hutan yang cepat.

- **Terinduksi oleh aktivitas manusia:** Berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang dipicu secara alami karena aktivitas manusia (misalnya pengeringan lahan gambut) telah meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.
- **Perubahan abadi tutupan *hutan alam**:** Perubahan permanen atau jangka panjang dari tutupan *hutan alam**. Perubahan sementara tutupan atau struktur hutan (misalnya pemanenan diikuti oleh regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai konversi.
- **Perubahan abadi area Nilai Konservasi Tinggi*:** Perubahan permanen atau jangka panjang dari salah satu *Nilai Konservasi Tinggi**. Perubahan sementara yang tidak berdampak negatif dan permanen terhadap nilai (misalnya pemanenan diikuti oleh regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai perubahan yang bertahan lama.
- **Hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan:** Hilangnya spesies dianggap signifikan jika spesies langka dan spesies terancam atau spesies penting lainnya, spesies utama dan/atau unggulan lokal hilang, baik dalam hal jumlah individu atau dalam hal jumlah spesies. Hal ini mengacu pada perpindahan dan kepunahan.

CATATAN: Untuk tujuan kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, proteksi kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai konversi. (Sumber: *Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC-POL-01-007 V1-0*)

Grup perusahaan: Totalitas badan hukum yang *terkait** organisasi berafiliasi dalam hubungan perusahaan yang salah satu pihak *mengontrol** kinerja pihak lain (misalnya perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, usaha patungan, dll.). Lihat juga Lampiran 1.

Hak adat: Hak-hak yang dihasilkan dari serangkaian tindakan kebiasaan atau adat yang panjang, terus-menerus diulang, yang dengan pengulangan tersebut dan dengan persetujuan yang tidak terputus, memperoleh kekuatan hukum dalam unit geografis atau sosiologis. (Sumber: *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatagunaan Hutan*) FSC-STD-01-001 V5-2

Degradasi: Perubahan dalam *hutan alam** tutupan yang secara signifikan dan negatif mempengaruhi komposisi spesies, struktur dan/atau fungsinya, dan mengurangi kapasitas ekosistem untuk memasok produk, mendukung keanekaragaman hayati dan/atau memberikan jasa ekosistem. (Sumber: *Kebijakan untuk Mengatasi Konversi* FSC-POL-01-007 V1-0)

Disosiasi (terpisah): Pengakhiran semua hubungan kontrak yang ada (anggota dan lisensi) antara FSC dan individu, organisasi dan *grup perusahaan** terkait*. Pemisahan juga mencegah masuknya hubungan kontrak baru dengan FSC.

Uji kelayakan: Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan cara organisasi itu menangani risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam operasi, rantai pasokan, dan investasinya

Hasil hutan: Bahan dan produk organik berbasis hutan yang dihasilkan dalam matriks hutan, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. (Sumber: Diadaptasi dari definisi hutan berdasarkan *Sertifikasi Rantai Penelusuran FSC-STD-40-004 V3-1.*)

Sektor hasil hutan: Mencakup semua entitas yang memperdagangkan atau memproduksi produk dari bahan organik berbasis hutan, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. (Sumber: Diadaptasi dari definisi hutan berdasarkan *Sertifikasi Rantai Penelusuran FSC-STD-40-004 V3-1.*)

Hasil rekayasa genetika (pohon): Organisme yang materi genetiknya telah diubah dengan cara yang tidak terjadi secara alami melalui perkawinan dan/atau rekombinasi alami. Kebijakan ini khusus untuk organisme yang berupa pohon. (Berdasarkan *Interpretasi FSC tentang GMO (Organisme yang Dimodifikasi Secara Genetik)* FSC-POL-30-602). (Sumber: *Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatagunaan Hutan* FSC-STD-01-001 V5-2)

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi: Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau diperlukan untuk keberadaan dan pemeliharaan yang teridentifikasi *Nilai Konservasi Tinggi** (Sumber: *Indikator Umum Internasional FSC-STD-60-004 V2-0*)

Nilai Konservasi Tinggi (NKT): Seperti yang didefinisikan dalam Prinsip dan Kriteria untuk Penatagunaan Hutan FSC FSC-STD-01-001 V5-2, termasuk keanekaragaman spesies NKT1, ekosistem dan mosaik tingkat lanskap NKT 2, ekosistem dan habitat NKT 3, jasa ekosistem kritis NKT4, kebutuhan masyarakat NKT5, dan nilai budaya NKT6.

Hak asasi Manusia: Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya dan merupakan jumlah hak individu dan kolektif yang ditetapkan dalam konstitusi negara dan hukum internasional. Hak asasi manusia itu bermacam-macam. Hak asasi manusia termasuk, minimal, hak-hak yang dinyatakan dalam Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia (terdiri dari

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen utama yang telah dikodifikasikan: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia). Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat No. 169 dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Bergantung pada situasinya, organisasi mungkin perlu mempertimbangkan standar dan instrumen tambahan.

Pemanenan ilegal dan/atau perdagangan ilegal hasil hutan*: Pemanenan kayu dan non-kayu *hasil hutan** melanggar setiap dan semua undang-undang yang berlaku di lokasi atau yurisdiksi tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, undang-undang yang terkait dengan perolehan hak pemanenan dari pemilik yang sah, metode pemanenan yang digunakan, dan pembayaran semua biaya dan royalti yang relevan. Istilah 'perdagangan ilegal' mengacu pada 'perdagangan ilegal' *hasil hutan** dan 'perdagangan legal secara ilegal *hasil hutan** dan termasuk, misalnya, penipuan, penyuaipan, dan pembelian atau penjualan kembali kayu yang ditebang secara ilegal'. (Sumber: Diadaptasi dari *Persyaratan untuk Sumber Kayu Terkontrol FSC FSC-STD-40-005 V3-1.*)

Hutan alam: Kawasan hutan dengan banyak karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman hayati, termasuk karakteristik tanah, flora, dan fauna, yang semua atau hampir semua pohonnya merupakan spesies asli, tidak diklasifikasikan sebagai perkebunan.

'Hutan alam' termasuk kategori berikut:

- Hutan yang dipengaruhi oleh pemanenan atau gangguan lainnya, yang pohon sedang atau telah diregenerasi oleh kombinasi regenerasi alami dan buatan dengan spesies khas hutan alam di lokasi tersebut, dan yang masih ada banyak karakteristik di atas tanah dan di bawah tanah dari hutan alam. Di hutan boreal dan hutan beriklim utara yang secara alami terdiri dari hanya satu atau beberapa spesies pohon, kombinasi regenerasi alami dan buatan untuk meregenerasi hutan dari spesies asli yang sama, dengan sebagian besar karakteristik utama dan elemen utama dari ekosistem asli situs tersebut, tidak dengan sendirinya dianggap sebagai *konversi** menjadi perkebunan.
- Hutan alam yang dipelihara dengan praktik silvikultur tradisional termasuk regenerasi alami atau terbantu.
- Hutan sekunder atau hutan kolonisasi yang berkembang dengan baik dari spesies asli yang telah beregenerasi di kawasan non-hutan.
- Definisi 'hutan alam' dapat mencakup kawasan yang digambarkan sebagai ekosistem berhutan, hutan, dan sabana.

(Sumber: *Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC-POL-01-007 V1-0*)

Konversi penting*: *Konversi** biasanya dianggap penting dalam hal:

1. *konversi** dari kawasan dengan *nilai konservasi tinggi* (NKT)* * jika atribut yang membentuk nilai-nilai ini tidak ada lagi,
2. *konversi** lebih dari 10 persen dari tutupan *hutan alam** oleh *terkait** individu atau organisasi* dan/atau *grup perusahaan* dalam satu kesatuan pengelolaan hutan selama lima tahun terakhir, atau
3. *konversi** lebih dari 10.000 ha tutupan *hutan alam** oleh *terkait** individu atau organisasi* dan/atau *grup perusahaan**.

Catatan Penjelasan:

- Khusus untuk tujuan kebijakan ini, perubahan sementara dalam *NKT** (misalnya pemanenan selektif yang diikuti dengan regenerasi sesuai dengan teknik pengurangan dampak) mungkin tidak dianggap signifikan.
- 10.000 ha merupakan akumulasi total luas dari kawasan *hutan alam** yang *dikonversi* oleh individu atau organisasi dan *grup perusahaan** terkait* mereka.
- Ambang batas ini dimaksudkan sebagai pemicu untuk menentukan apakah hutan *konversi** dianggap signifikan. Melebihi ambang batas ini biasanya akan dianggap sebagai pelanggaran kebijakan; lebih lanjut, *konversi** yang berada di bawah ambang batas ini juga dapat dianggap signifikan jika dianggap berdampak tinggi.
- Dalam menilai kasus, faktor-faktor lain akan dipertimbangkan, termasuk namun tidak terbatas pada: dampak ekologi dan sosial regional; rencana untuk *konversi* berlanjut*; *konversi* berulang*; *konversi* masa lalu* (melampaui lima tahun terakhir); dan upaya restorasi.
- Untuk tujuan kebijakan ini, tidak diharapkan bahwa individu, organisasi, atau *grup perusahaan** terkaitnya akan secara sistematis melakukan penilaian *NKT** untuk menentukan keberadaan *NKT** dan ancaman terhadap mereka. Sebaliknya, diharapkan mereka menggunakan alat yang tersedia dan memiliki strategi mitigasi untuk situasi ketika ada potensi risiko *NKT**. Untuk perangkat, bacalah misalnya Platform Penilaian Risiko FSC, Panduan NKT untuk Pengelola Hutan (FSC-GUI-30-009) dan Panduan FSC untuk Implementasi Hak Atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) (FSC-GUI-30.003).

Catatan untuk konsultasi:

Silakan lihat pertanyaan mengenai proposal untuk ambang untuk konversi yang signifikan di [Platform Konsultasi FSC](#).

Informasi penting: Informasi yang dapat dipercaya yang diberikan oleh pihak ketiga dan/atau dikumpulkan melalui penelitian independen yang diperoleh dari sumber terpercaya/terkenal merupakan bukti kuat untuk dipertimbangkan dalam penyelidikan. Informasi penting dapat mencakup salah satu bentuk berikut selama bukti memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam definisi ini: laporan ilmiah, analisis teknis, laporan sertifikasi, artikel berita yang dikuatkan, laporan resmi dan/atau pengumuman oleh otoritas pemerintah, analisis hukum, Informasi Geografis Informasi sistem (koordinat batas, pemetaan perubahan satelit), video atau rekaman, gambar, wawancara independen, pernyataan tertulis dan deklarasi, notulen rapat, dan informasi perusahaan/organisasi.

Hak pekerja: Hak-hak yang didefinisikan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Konvensi Inti ILO. Prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja mencakup kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan pekerja anak yang efektif; dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan. Hak-hak dasar ini dan implementasinya telah diperiksa lebih lanjut, misalnya dalam Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial dan untuk tujuan verifikasi dalam Persyaratan Ketenagakerjaan Inti FSC.

Tabel 2: Bentuk verbal untuk pernyataan ketentuan

[Diadaptasi dari Arahannya ISO/IEC Bagian 2: Aturan untuk struktur dan penyusunan Standar Internasional]

"harus": menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan dokumen.

"seharusnya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan satu direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan.

"mungkin": menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

"bisa": digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik, atau kausal.

DRAFT



Forest Stewardship Council®

www.fsc.org

FSC International Center GmbH
Adenauerallee 134 · 53113 Bonn · Germany



Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang FSC® Internasional
2022 FSC® F000100